

1311 / 11 - 2002

**PERANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
TIMOR TIMUR**

Sipisis

SKRIPSI

Guna Memenuhi Sebahagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

HENDRA PERDANA

BP. 95140 122



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2001**

Reg. No. : 1097 / PK V / III / 2001

PERANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TIMOR TIMUR

ABSTRAK

(Hendra Perdana, 95 140 122, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 63 hal,
2001)

Selama berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur selalu menjadi sorotan dunia Internasional karena proses integrasi tersebut dianggap sebagai suatu unsur yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia, sehingga dimasukkan kedalam agenda sidang MU PBB. Berkat pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru disidang-sidang MU PBB, masalah Timor Timur dapat dikatakan telah berhasil diselesaikan, ini dibuktikan dengan ditundanya beberapa kali sidang MU PBB mengenai masalah Timor Timur.

Akibat tekanan dunia Internasional pada masa pemerintahan Presiden Habibie perundingan mengenai masalah Timor Timur dibuka kembali. Perundingan yang berlangsung antara Indonesia dengan Portugal dilaksanakan dibawah naungan PBB ini menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Agreman 5 Mei .

Isi terpenting dari Agreman 5 Mei adalah akan dilaksanakannya jajak pendapat di Timor Timur yang akan dilaksanakan oleh PBB dengan membentuk UNAMET. Dalam jajak pendapat tersebut ditanyakan apakah rakyat Timor Timur menerima atau menolak tawaran Pemerintah Indonesia mengenai status khusus dengan otonomi luas untuk Timor Timur.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Timor Timur menolak tawaran Indonesia dan berdasarkan hasil tersebut sesuai dengan Agreman 5 Mei , Pemerintah Indonesia menyerahkan wewenangnya atas Timor Timur kepada PBB kembali kepada statusnya sebelum berintegrasi dengan Indonesia yaitu Daerah yang tidak ber Pemerintahan sendiri . PBB kemudian membentuk UNTAET untuk membantu rakyat Timor Timur dalam mempersiapkan kemerdekaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis melakukan penelitian Normatif Yuridis dengan mengandalkan data Primer dari Instansi atau lembaga yang terkait dan ditunjang dengan data Sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data yang Penulis gunakan bersifat Deskriptif Analisis untuk menggambarkan bagaimana usaha PBB dalam menyelesaikan sengketa Timor Timur.

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan ternyata diketahui bahwa PBB telah memprakarsai perundingan antara Indonesia dengan Portugal dan sekaligus melaksanakan hasil perundingan tersebut. Dalam menyelesaikan sengketa Timor Timur ini PBB membentuk UNAMET, UNTAET dan pengiriman Pasukan Multinasional. Setelah menulis skripsi ini Penulis berharap agar masalah seperti yang terjadi di Timor Timur tidak terjadi lagi di Daerah lain di Wilayah Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah jiwa dan semangat Pancasila sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45¹. Dalam alinea 1 Pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Kata-kata tersebut diatas diwujudkan dalam pemberian referendum kepada rakyat Timor Timur dengan dua opsi ; otonomi seluasnya atau berpisah dari Indonesia².

Proses kemerdekaan Timor Timur mulai dari perundingan Tripartit antara Indonesia dengan Portugal hingga dilaksanakanya referendum sampai pengiriman pasukan multinasional untuk memulihkan perdamaian di Timor Timur dan menjamin kawasan itu kearah kemerdekaan .

Pasukan multinational tersebut dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1264-1999³. Keseruluhan proses tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan PBB. Hal ini sesuai dengan tujuan PBB yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB yaitu ; mempertahankan keamanan dan perdamaian Internasional, sampai titik penghabisan secara bersama menyelesaikan perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian international dan semua tindakan dimaksud berdasarkan keadilan dan hukum Internasional .

Masalah Timor Timur dimulai sejak masuknya militer Indonesia berdasarkan Deklarasi Balibo yang ditanda tangani oleh 4 partai dari 5 partai yang ada di Timor Timur. Keempat partai tersebut adalah UDT, Apodeti, KOTA dan Tabalhistia sedangkan partai yang tidak ikut menandatangani adalah Fretelin yang terus berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur.

1. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 183.

2. Dewi Fortuna Anwar, "Habibie dan Timor-timur", Tempo, Edisi 01-08 Februari 1989, hal 30-3.

3. Ragam, Baret Biru, Gatra, 25 September 1999, hal 57.

Alasan utama Pemerintah RI melakukan integrasi adalah agar Timor Timur tidak menjadi negara komunis sebagaimana Kuba di benua Amerika alasan ini juga dianut Amerika Serikat sewaktu masih perang dingin dengan Rusia.

Integrasi tersebut disyahkan melalui UU no. 7 / 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan RI dan Pembentukan Daerah Tk 1 Timor Timur yang kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR no. VI / 1978.

Pada awalnya proses masuknya tentara Indonesia ke Timor Timur sudah dibahas di sidang Majelis Umum PBB dan menghasilkan Resolusi MU no. 3458 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 384 yang berisikan seruan agar pemerintah RI menarik pasukannya dari Timor Timur.

Kemudian masalah integrasi tersebut dibahas beberapa kali namun berkat lobi politik luar negeri Indonesia masalah tersebut berhasil diredam. Sementara Indonesia melakukan lobi-lobi politik didunia Internasional, Xanana Gusmao selaku Presiden CNRT juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Ramos Horta diberi tugas khusus melakukan lobi politik diluar negeri untuk meminta bantuan negara lain membawa masalah Timor-Timur ke meja perundingan Internasional⁴.

Setelah president Soeharto mundur dan digantikan dengan President Habibie usaha Ramos Horta berhasil. Perundingan mengenai masalah Timor Timur dibuka kembali antara Indonesia dengan Portugal. Perundingan tersebut dilaksanakan dibawah naungan PBB.

Dalam perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa akan diadakan referendum di Timor Timur mengenai pelaksanaan dan jadwal referendum diserahkan kepada PBB yang kemudian membentuk UNAMET.

Timor Timur itu sendiri terdapat dua kelompok besar yang bertikai yaitu kelompok pro otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan. Setelah referendum dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, kekuasaan Indonesia atas Timor Timur resmi di serahkan oleh Presiden KH Abdulrahman Wahid melalui wakil

4. Jhon G.Taylor, Perang Terselubangi, Sejarah Timor-timur yang terlupakan, Penerjemah Piteri-Jakarta, Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor, 1998, hal 322.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dekolonisasi Timor Timur merupakan masalah yang tak kunjung selesai berawal dari keinginan berintegrasi sebagian besar rakyat Timor Timur dengan Indonesia hingga ada tekanan yang memaksa Indonesia mengeluarkan dua opsi : pemberian status khusus dengan otonomi luas atau referendum.

Pada awal proses dekolonisasi di Timor Timur, Indonesia memilih sikap damai dengan memberi kesempatan penuh kepada Portugal, serta partai-partai politik di Timor Timur untuk menyelesaikan dekolonisasi secara baik-baik. Sikap ini ditunjukkan dengan usaha Indonesia mempersatukan partai-partai politik yang bersengketa, seperti hadirnya Apodeti dipertemuan Macao, ini berkat bimbingan Indonesia.

Dengan pengesahan UU no. 7/1976, maka resmilah Timor Timur menjadi propinsi yang ke-27 hal ini menimbulkan reaksi internasional terutama disidang MU PBB. Indonesia dituduh sebagai agresor serta dituntut agar ditariknya pasukan Indonesia dari Timor Timur.

Pada periode 1976-1982 usaha Indonesia dalam penyelesaian masalah Timor Timur adalah melalui perundingan-perundingan disidang MU PBB dan pada periode berikutnya melalui perundingan Tripartit dengan Portugal dibawah naungan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Alatas, SH. *Penyelesaian Masalah Timor Timur*, Deplu, Jakarta, 1999.
- Bantaro Bando, *Dimensi Internasional, Masalah Timor Timur, Analisa II*, CSIS, Jakarta, 1986.
- CSIS, *Integrasi Timor Timur, 1976 (1)*, Seri Dokumentasi CSIS, Jakarta, 1983.
- _____, *Indonesia dan Dunia Internasional, 1976*, CSIS, Jakarta, 1980.
- _____, *Timor Timur 1985*, Seri dokumentasi CSIS, Jakarta, 1984.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Deplu RI, *Decolonization in East Timor*, Jakarta, 1991.
- Howard Wriggin, *Integrasi Bangsa Dalam Buku Yahya Muhaimin CMA, Masalah-masalah Pembangunan Politik Edisi 4*, Gamma Yogyakarta 1985.
- James Barros, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, Bumi Aksara Jakarta, 1990.
- Jhon G. Taylor, *Perang Tersembunyi Di Timor-timur*, Putih Jakarta Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor-timur, 1998.
- Jean Elvardi, *Penyelesaian Segketa Internasional*, Diktat Bahan Kuliah, Padang, 1996.
- Misward Djmil, Dkk, *Mengenal PBB dan 170 Negara*, Kreasi Jaya Utama, 1988.
- PBB, *Pengetahuan Dasar PBB*, PBB, Jakarta, 1995.
- Biro pusat Statistik Timor Timur, Jakarta, 1980.

Majalah dan Koran

- Gatra
- Republik
- Tempo
- Kompas